

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	15
BAB II INJAUAN PUSTAKA	23
A. Politik Hukum Sebagai Sarana Reformulasi Pengaturan.....	23
B. Konsep Pelapor Dalam Sistem Hukum.....	28
C. Konsep Perlindungan dalam Sistem Hukum	35
D. Konsep Perlindungan Hukum Tindak Pidana Korupsi	42

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Sifat Penelitian	51
B. Bahan Penelitian	53
C. Lokasi dan Subyek Penelitian	58
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data	60
F. Jalannya Penelitian	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Politik Hukum Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi	65
1. Aspek Filosofis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi	66
2. Aspek Sosiologis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi	70
3. Aspek Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi	82
B. Problematika Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi	98
1. Problematika Pelaksanaan Perlindungan Hukum awal berlakunya UU PSK tahun 2006	98
2. Problematika Pelaksanaan Perlindungan Hukum pasca perubahan menjadi UU PSK tahun 2014	111

C. Permasalahan Pengaturan dan Kebutuhan Reformulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi	147
1. Permasalahan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Masa Sekarang	147
2. Kebutuhan Reformulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang	167
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA	183
INDEKS ISTILAH.....	193
INDEKS SUBYEK.....	195
GLOSARIUM.....	197
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar ancaman/ intimidasi/ kriminalisasi terhadap aktivis, saksi dan pelapor tindak pidana korupsi	104
Tabel 2.	Aduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019-2021.....	112
Tabel 3.	Perlindungan Hukum LPSK terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2022.....	117
Tabel 4.	Pengaturan Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....	139
Tabel 5.	Pengaturan Ketentuan Pidana dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK.....	164